

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkaitan dengan pelaksanaan kinerja pegawai pemerintahan di Indonesia, banyaknya kasus penyimpangan yang ditemukan menyebabkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Masyarakat menuntut agar pemerintah dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, sehingga dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap pemerintah daerah tentunya menginginkan daerahnya memiliki kinerja yang dianggap baik oleh masyarakat, sebab hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola daerahnya. Semua tentang pemerintahan daerah telah diatur dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah merupakan pihak penyelenggara urusan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, membangun dan mengelola roda perekonomian di lingkup daerahnya. Pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diatur juga dalam UU No. 9 tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah bisa mengoptimalkan dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya, karena pemerintahan itu sendiri lebih tahu apa yang bisa dikembangkan di daerahnya masing-masing. Walaupun demikian pemerintah daerah juga tetap harus sejalan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tetap dikontrol oleh pemerintah pusat.

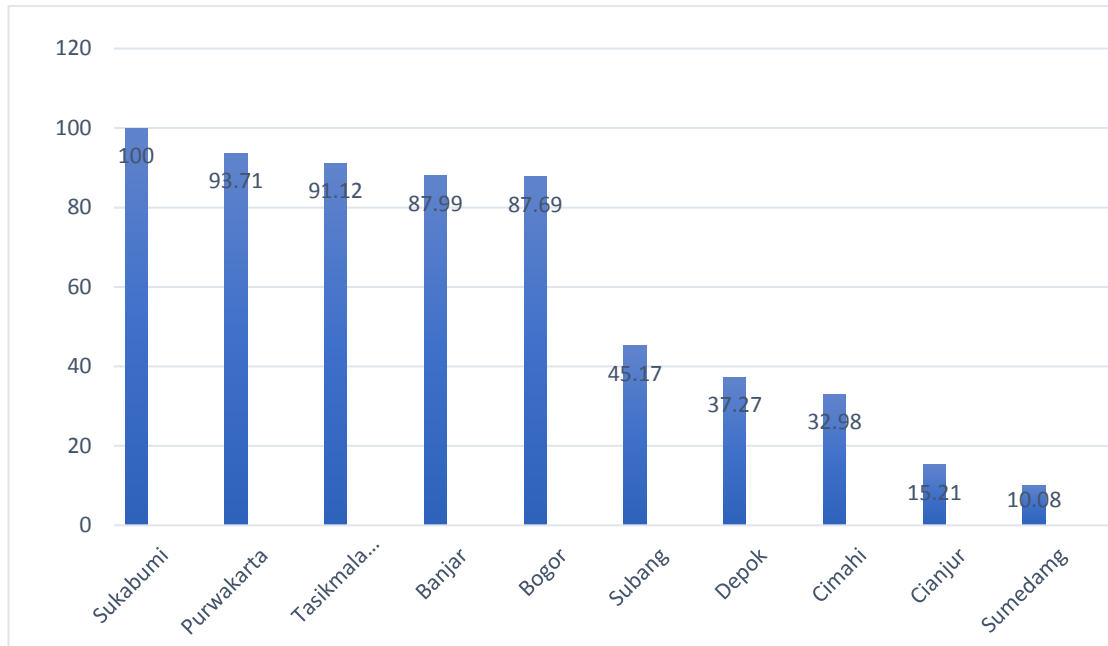
Organisasi sektor publik adalah suatu entitas yang mempunyai aktivitas yang berhubungan dengan usaha menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2002, hlm. 2). Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berorientasi pada publik atau masyarakat. Suatu tindakan yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat, memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat dan kebijakan-kebijakannya pun harus memihak kepada

masyarakat. Karena orang-orang yang bekerja dalam organisasi sektor publik telah diberikan kepercayaan dalam melayani masyarakat.

Dimata masyarakat kinerja pemerintah selalu menjadi suatu perhatian besar dan masyarakat pun sering melakukan penilaian atas hasil capaian pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Penilaian kinerja dianggap menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan di instansi pemerintah. Kebutuhan untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik merupakan hal wajib untuk dipenuhi, hal ini sesuai dengan PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan PP 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban kepala daerah. Peraturan pemerintah ini memerintahkan agar pertanggungjawaban kepala daerah tidak hanya berfokus kepada pertanggungjawaban keuangan saja, tetapi harus bisa menjelaskan bagaimana realisasinya, apakah dana-dana yang bersumber dari masyarakat atau dari sumber lainya telah dipergunakan dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan penilaian tersebut adalah untuk memaksimalkan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mendefinisikan kinerja instansi pemerintah sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh ketua Pusat Kajian dan Kepakaran Statistik (P2KS) Unpad, Toharudin (2015) memaparkan hasil survei Kepuasan Publik atas Kepemimpinan Kepala Daerah di Jawa Barat tahun 2015. Survei ini menilai 6 aspek kinerja, yaitu infrastruktur, kepemimpinan, regulasi, pelayanan dasar, anggaran, dan sumber daya aparatur. Dari penilaian tersebut ada 5 kabupaten dengan indeks kepuasan responden tertinggi, yaitu Sukabumi (100,00), Purwakarta (93,71), Tasikmalaya (91,12), Banjar (87,99), dan Bogor (87,69). Sedangkan kabupaten dengan nilai indeks terendah yaitu Sumedang (10,08), Cianjur (15,21), Cimahi (32,98), Depok (37,27), dan Subang (45,17).



Sumber: Unpad.ac.id (2015)

Grafik 1.1 Tingkat Kepuasan Publik atas Kepemimpinan Kepala Daerah

Berdasarkan data di atas bisa disimpulkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten Sumedang merupakan yang paling rendah. Menurut Robbins (2003, hlm. 40) kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Seorang pemimpin yang baik bisa menciptakan kinerja organisasi yang baik juga dengan cara memaksimalkan kinerja anggotanya agar bisa mencapai tujuan organisasi yang diharapkan oleh publik. Jika kepuasan publik terhadap kepemimpinan rendah, ini menunjukkan buruknya kepemimpinan seorang kepala daerah dalam memimpin organisasi pemerintahnya yang belum bisa mencapai tujuan organisasi pemerintah yang diinginkan dan diharapkan oleh publik. Semakin baik kinerja pemerintah, maka masyarakat akan menaruh kepercayaan yang besar kepada pemerintah dan juga menciptakan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahnya. Sebaliknya apabila kinerja pemerintah itu buruk maka kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun.

Didapati dalam website Jejakkasus.info pada tanggal 31 Maret 2017, telah terjadi perbuatan yang melawan hukum yang mana pelakunya adalah ada 2 orang oknum pemeriksa di Dinas Inspektorat Kab. Sumedang yang sering kali melakukan

Hary Taufik, 2018

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pungutan kepada kepala desa sebesar Rp.1.000.000,00/desa. Dari hasil survei terhadap beberapa saksi bahwa kejadian tersebut telah diketahui oleh Kepala Dinas Inspektorat. Pungutan ini berjalan cukup lama dan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh dinas terkait, yang notabene nya inspektorat termasuk sebagai pemberantas pungli tetapi telah melakukan pungli itu sendiri.

Melihat permasalahan yang terjadi di Dinas Pemerintahan Sumedang tersebut, bisa dinilai bahwa kinerjanya masih kurang baik yang ditunjukkan masih adanya pungutan liar, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum yang masih terus saja dibiarkan. Upaya peningkatan kinerja organisasi harus secara terus-menerus dan berkelanjutan, ini dilakukan supaya terwujudnya suatu pemerintahan yang baik yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik maka perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja pemerintah yang baik juga. Instansi pemerintah harus membuat penetapan kinerja secara berjenjang dengan tujuan untuk mewujudkan capaian yang baik. Melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan pencapaiannya baik berupa keberhasilan maupun manfaat.

Secara umum, kinerja diartikan sebagai suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Menurut Mahsun (2014, hlm. 53) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial SKPD, salah satunya adalah sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal pada pemerintah sangat diperlukan guna mewujudkan kinerja aparat pemerintah yang baik. Seperti yang dijelaskan oleh A. Arens et al. (2008, hlm. 340) bahwa tujuan sistem pengendalian internal yaitu menyajikan laporan keuangan yang andal, melakukan kegiatan operasi yang efektif juga efisien, dan

patuh terhadap hukum dan peraturan. Selain itu menurut PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP, bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan diterapkannya sistem pengendalian internal yang efektif diharapkan bisa berpengaruh terhadap kualitas kinerja manajerial suatu pemerintahan daerah.

Sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Aramide & Bashir (2015), Azlina & Amelia (2013), Badara & Saidin (2013), Darmawan & Supriatna (2016), Farida (2013), Friyanti (2016), Hakim dkk. (2016), Hasnani (2016), Manurung (2012), Praja (2015), dan Prayoga (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

Walaupun banyak penelitian yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah, tapi faktanya yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Sumedang masih saja menunjukkan suatu kinerja manajerial yang kurang baik. Maka dalam penelitian ini akan mencoba menambahkan variabel lain untuk memperkuat pengaruh penerapan SPIP terhadap kinerja manajerial. Dalam penelitian ini komitmen organisasi digunakan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal pemerintah dan kinerja manajerial.

Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi (Angle & Perry, 1981). Beberapa penelitian sebelumnya juga seperti yang dilakukan oleh Kholidah & Murtini (2014), Lathuheru (2006), Biduri (2011), Brownell & Mcinnes (1986), Sumarno (2005) dan Azhar L dkk. (2009) menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi terhadap kinerja manajerial. Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada konteks pemerintah daerah, aparat sebagai pelaksana organisasi pemerintahan lebih bertanggung jawab jika didukung dengan komitmen aparat yang tinggi terhadap organisasi (instansi) pemerintah daerah. Aparat akan lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi. Hal ini akan mendorong

aparatus menjalankan kinerja suatu pemerintahan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintahan tersebut dan akan meningkatkan kinerja.

Berdasarkan latar belakang di atas dan penelitian-penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai kinerja manajerial suatu pemerintah daerah. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis melakukan penelitian pada objek yang berbeda. Adapun judul penelitiannya adalah **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi”**. (Studi Empiris Pada Seluruh SKPD di Kabupaten Sumedang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, yaitu rendahnya kepuasan publik atas kepemimpinan kepala daerah yang diakibatkan oleh kinerja manajerial pemerintah yang buruk dan masih ditemukannya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial
2. Bagaimana interaksi Komitmen Organisasi dalam memoderasi pengaruh SPIP terhadap Kinerja Manajerial

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial
2. Menguji secara empiris interaksi komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh SPIP terhadap Kinerja Manajerial

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi SKPD di Pemerintah Kabupaten Sumedang, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penerapan SPIP, dan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan penerapan SPIP.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi keilmuan dalam ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi sektor publik. Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya terutama dalam penelitian yang membahas tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah.